POLITIK IDENTITAS DAN RESOLUSI KONFLIK TRANSFORMATIF

Purwanto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
masbisonoto@gmail.com

Abstract

This article aims at describing the values of pluralism and its basic principles. Multiculturalism as the doctrine of 'common culture' provides space for achievement of two needs: (1) the maintenance of diversity and integration at the level of community; (2) sustainability of unity at the level of the nation in order to achieve the goals as a nation. Multiculturalism approach is an alternative approach to politics of identity as well as an alternative to conflict resolution. Multiculturalism with pro-existence approach is conflict resolution strategy which is able to transform the tension in democracy and plurality into a new social order which gives chance for the presence of a productive interaction among diverse identities and the same time provides social integration to assure the sustainability of the principles of democracy and human rights.

Key Words: Multiculturalism, politics of identity, conflict

Abstrak

Artikel ini berupaya menyemaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Multikulturalisme memberi ruang bagi pencapaian dua kebutuhan sekaligus, yakni, terpeliharanya kemajemukan dan integrasi (*integration*) di tingkat masyarakat dan persatuan (*unity*) yang berkelanjutan di tingkat bangsa guna pencapaian cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa. Pendekatan multikulturalisme ialah pendekatan alternatif terhadap politik identitas sekaligus merupakan resolusi konflik yang lebih bersifat transformatif untuk menghalau potensi destruktif dari politik identitas. Multikulturalisme dengan pendekatan pro-eksistensi adalah strategi resolusi konflik yang mampu mentransformasikan ketegangan yang dibawa oleh demokrasi dan kemajemukan ke dalam sebuah tatanan sosial baru yang memberi ruang bagi hadirnya interaksi yang produktif di antara identitas-identitas yang beragam. Namun memiliki integrasi sosial yang mampu menjamin prinsip-prinsip demokrasi dan HAM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Multikulturalisme, politik identitas, konflik

Pendahuluan

Pembahasan ini berupaya menjembatani tema politik identitas dan resolusi konflik melalui konsep multikulturalisme, yaitu sebagai pendekatan alternatif terhadap politik identitas sekaligus merupakan resolusi konflik yang lebih bersifat transformatif untuk menghalau potensi destruktif dari politik identitas.

Pada bagian awal, dibuka percakapan kunci tentang politik identitas. Bagian ini dimaksudkan untuk menjelaskan beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan tema ini. Telaah ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah gambaran umum tentang bagaimana sosiologi politik memahami politik identitas, baik sebagai konsep maupun fenomena sosial. Pada bagian selanjutnya, beberapa pengetahuan dasar tentang resolusi konflik akan saya paparkan dalam bentuk butir-butir pemikiran. Sebagian dari pembahasannya akan menyinggung beberapa pengetahuan yang lebih praktis tentang strategi dan fasilitasi resolusi konflik.

Bagian paling akhir dari tulisan ini dipaparkan tentang multikulturalisme sebagai respon yang bersifat transformatif terhadap kemajemukan. Dalam bagian ini, dibuka diskusi tentang tema multikulturalisme dalam sebuah percakapan yang menghadapkan identitas sebagai sebuah kekhususan budaya dan kebutuhan untuk menghadirkan integrasi sosial yang memungkinkan kelompok etnis dan budaya yang beragam itu dapat membangun sebuah kehidupan bersama yang lebih masuk akal.

Politik Identitas sebagai Konsep dan Praktik

Sebagai sebuah definisi umum, politik identitas merujuk pada praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok—sering atas dasar etnis, agama, atau denominasi sosial-kultural lainnya—yang merupakan kontras terhadap praktik politik yang berbasiskan kepentingan (*interest*). Walaupun sesungguhnya ini bukan merupakan fenomena yang sepenuhnya baru, politik identitas merupakan sebuah tema yang menarik

perhatian para ahli ilmu sosial belakangan ini, terutama setelah terjadinya konflik yang melibatkan kekerasan di antara berbagai kelompok etnis yang berbeda. Konflik di antara kelompok etnis Tutsi dan Hutu di Afrika, Bosnia dan Serbia di Balkan, adalah dua contoh fenomenal yang memperlihatkan dengan jelas keterlibatan praktek politik identitas dalam wajahnya yang paling jelas, brutal, dan destruktif.

Kecenderungan akan berkembangnya politik identitas sama sekali tidak berkaitan dengan sistem politik tertentu. Politik identitas bahkan dapat berkembang subur dalam sistem demokrasi sekalipun. Di Indonesia, kecenderungan itu terlihat lebih jelas justru ketika terdapat ruang untuk mengekspresikan kebebasan. Praktik politik identitas di negeri ini dapat dikenali melalui berbagai bentuk, dari yang samar-samar hingga agak jelas. Sebagian orang berpendapat bahwa pembentukan partai nasional yang berbasis agama dan daerah administratif setingkat provinsi dan kabupaten atas dasar ikatan etnis di beberapa wilayah di luar Jawa merupakan indikasi akan terjadinya kecenderungan itu.

Dalam kasus yang terakhir, pembentukan daerah-daerah administratif di beberapa wilayah memperlihatkan sekaligus terjadinya teritorialisasi identitas—sebuah konsep yang dipakai untuk merujuk berkembangnya fenomena politisasi identitas etnik (kadang bercampur dengan agama atau yang lainnya) untuk tujuan pembentukan daerah pemerintahan baru. Teritorialisasi identitas sering merupakan awal dari *re-grouping* kultural atas dasar wilayah yang dalam praktiknya dapat mengambil wajah terbentuknya daerah otonom, bahkan negara baru. Dalam kasus yang terakhir, terbentuknya Pakistan dari India dan Bangladesh dari Pakistan adalah contoh-contoh yang cukup jelas untuk menggambarkan teritorialisasi identitas yang berakhir dengan pemisahan diri secara politik dari kelompok dominan.

Politik identitas (dalam buku teks sering disebut dengan dua terminologi yang saling dipertukarkan: “*identity politics*”

atau “*politics of identity*”) merujuk pada berbagai bentuk mobilisasi politik atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya seringkali disembunyikan (*hidden*), ditekan (*suppressed*), atau diabaikan (*neglected*), baik oleh kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung untuk dan atas nama demokrasi yang lebih progresif.

Tidak semua politik identitas mengambil bentuk sebuah perjuangan pemisahan diri. Gerakan gay dan lesbian—atau, perjuangan yang dilakukan oleh kelompok “orang cacat” (*diffable persons*)—adalah contoh lain dari politik identitas yang terutama ditujukan untuk memperoleh pengakuan politik yang lebih mendasar untuk memungkinkan diterimanya perlakuan yang lebih adil atas dasar perbedaan yang bersifat khusus (*peculiar*) yang dimiliki dan atau melekat pada individu.

Konsep Dasar Identitas sebagai Sebuah Konstruksi Sosial

Para ahli ilmu sosial berperspektif konstruktivis-interpretivis percaya bahwa identitas adalah hasil sebuah konstruksi sosial. Walaupun cukup banyak varian dari perspektif ini, pada umumnya mereka percaya bahwa identitas adalah sumber dan sekaligus bentuk makna dan pengalaman yang bersifat subjektif dan intersubjektif. Oleh karena itu, identitas adalah hasil sebuah proses dan praktik sosial. Dua perspektif lainnya, yakni primordialis dan instrumentalis memiliki pandangan yang berbeda tentang identitas. Perspektif primordialis percaya bahwa identitas adalah sebuah “penanda” yang diperoleh melalui asal usul keturunan dan karena itu bersifat “*given*”. Sedang perspektif instrumentalis percaya bahwa identitas adalah hasil mobilisasi dan manipulasi.

Identitas tidak pernah tunggal melainkan majemuk. Identitas selalu ‘berubah’ menurut konteks sosial. Dengan kata lain, identitas selalu ditemukan dalam kaitannya dengan “yang lain” (“*other*”). *Multiplicity of identity* adalah sebuah fenomena

umum yang terbentuk oleh berbagai elemen dan melalui interaksi sosial.

Elemen-elemen penting identitas dapat mengambil bentuk yang sangat beragam: dari yang fisik (misalnya warna kulit, rambut, dan mata) sampai yang bersifat sosial seperti sejarah, nasionalitas, gender, etnisitas, agama, tradisi, bahasa dan dialek, kelas dan gaya hidup, serta ideologi, kepercayaan dan sentimen.

Formasi identitas adalah sebuah proses sosial yang sangat kompleks, dinamis, dan selalu berimplikasi pada terbentuknya relasi sosial dan struktur kekuasaan atas dasar ketidaksetaraan (*inequalities*), divisi sosial (*social division*), dan perbedaan (*difference*). Oleh karena itu, walaupun merupakan sebuah konstruksi sosial, identitas selalu memiliki aspek politik—baik sebagaimana ditemukan dalam praktik maupun wacana. Fungsi terpenting identitas adalah sebagai pembeda dan sekaligus pengada. Selain itu, identitas juga membantu terciptanya solidaritas dan integrasi sosial.

Sebagai pokok kajian, studi tentang identitas dapat dibidik dari tiga sudut yang berbeda: *legitimizing identity*, *resistance identity*, dan *project identity*. *Legitimizing identity* menawarkan kajian identitas dari perspektif kelompok atau lembaga dominan yang bertujuan memperoleh rasionalisasi dan justifikasi atas dominasi dan otoritasnya terhadap yang lain. *Resistance identity* membuka cara melihat identitas dari sudut pandang kelompok yang tertindas, dimarginalisasi, dan atau didevaluasi oleh kelompok dominan. *Project identity* menyoroti isu yang berhubungan dengan transformasi identitas sebagai sebuah proyek yang dibangun untuk sebuah perubahan. *Resistance identity* dan *project identity* bersentuhan sangat erat dengan tema politik identitas.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa studi tentang identitas berhubungan dengan usaha memahami “siapa kita dan mereka” dan secara resiprokal berhubungan dengan bagaimana “orang memahami mereka sendiri dan orang lain”.

Oleh karena itu, dalam identitas selalu terdapat komponen yang menceritakan diri sendiri dan sekaligus orang lain.

Konflik dan Resolusi Konflik

Konflik dapat mengambil bentuk yang lunak, *subtle*, sampai kepada bentuk-bentuk yang keras dan terbuka, ketidaksukaan (*dislikeness*), ketidaksepakatan (*discord*), ketidaksetujuan (*disagreement*), perseteruan (*rivalry*), persaingan (*competition*), permusuhan (*hostility*), oposisi (*opposition*), kontak fisik yang melibatkan kekerasan (*violence*), dan sebagainya.

Konflik dapat terjadi karena banyak hal: partisipan terlibat dalam usaha persaingan memenangkan sumber (merebut-merebut; merebut-mempertahankan; mempertahankan-mempertahankan), perbedaan kepentingan/tujuan (rasionalisasi-ekspansi), atau perbedaan nilai (pertumbuhan-pemerataan).

Sumber konflik sangat beragam. Ia dapat memiliki dimensi ekonomi, politik, ideologi atau budaya. Konflik yang berdimensi ekonomi dan politik kerap berhubungan dengan aspek instrumental dan material (siapa mendapatkan apa atau siapa kehilangan apa dan berapa banyak). Konflik yang berdimensi ideologi atau budaya berhubungan dengan identitas dan karena itu sering memiliki aspek yang lebih fundamental.

Konflik dapat terefleksikan secara riil maupun abstrak. Konflik riil memudahkan partisipan konflik menemukan cara-cara penyelesaiannya. Konflik abstrak menyulitkan partisipan dan karenanya menjauhkan mereka dari cara-cara penyelesaian.

Partisipan konflik dapat terlibat dalam perbedaan melihat aspek-aspek konflik, sumber konflik, cara penyelesaian konflik, dan tujuan akhir konflik. Karena itu, orang dapat saja bersepakat tentang apa yang mereka percaya sebagai sumber konflik namun berbeda tentang bagaimana menyelesaikannya. Mempertemukan cara pandang yang sama tentang ketiga hal tersebut merupakan bagian terpenting dalam penyelesaian konflik.

Bentuk-bentuk penyelesaian konflik adalah negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Negosiasi terjadi apabila di antara kedua belah pihak berunding secara langsung. Ia merupakan bentuk penyelesaian yang efektif apabila kekuasaan relatif yang dimiliki partisipan seimbang. Perbedaan kekuasaan yang terlampau besar hanya menghasilkan dominasi.

Mediasi dan arbitrase terjadi ketika terdapat pihak lain yang berfungsi sebagai penengah. Dalam mediasi pihak lain terutama berperan sebagai fasilitator yang mencoba memperkecil perbedaan dan memperbesar kemungkinan pihak-pihak yang bersengketa menemukan kesepakatan. Walaupun ia mungkin memberikan saran-saran tentang keuntungan dan atau kerugian dari setiap solusi, ia sendiri tidak berposisi mengambil keputusan tentang jalan keluar.

Sementara itu, dalam arbitrase, pihak ketiga berposisi lebih menentukan proses perundingan. Posisi itu bisa diperoleh karena wibawa yang dimilikinya (misalnya kharisma apabila *arbitrator* merupakan individu atau otoritas apabila ia merupakan sebuah institusi). Walaupun *arbitrator* mungkin saja memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk mengemukakan pandangan-pandangannya, pada akhirnya ia yang membuat keputusan. Untuk beberapa keadaan, *arbitrator* dapat membuat keputusan yang kewenangannya semengikat pengadilan. Tentu saja, kewenangan ini datang karena adanya kesediaan dari pihak yang bersengketa sebelum mereka meminta *arbitrator* untuk menengahi konflik tersebut.

Bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan amat mirip dengan *arbitrator*. Perbedaannya terletak pada sifat otonom dan daya paksa yang dimilikinya. Tanpa harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, pengadilan dapat menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan konflik. Dalam kasus perdata dan delik aduan, permintaan dari satu pihak saja sudah cukup untuk menggelar sidang.

Cara penyelesaian konflik dapat mengambil pola *zero-sum game* (menang-kalah) atau *non-zero-sum game* (menang-menang); pola kedua menghasilkan situasi yang kurang destruktif dibandingkan yang pertama. Konflik memiliki fungsi. Konflik menghasilkan asosiasi, koalisi, dan solidaritas internal, yang tidak jarang diikuti oleh munculnya pemimpin yang efektif. Konflik, karena itu, membantu terjadinya proses sentralisasi kekuasaan di masing-masing kelompok yang bertikai.

Konflik cenderung memecah kelompok ke dalam dua faksi. Semakin faksi itu terbelah menurut garis klas, etnis, ras dan agama, semakin tajam pula konflik yang terjadi. *Cross-cutting memberships* dapat membantu proses netralisasi konflik.

Organisasi atau masyarakat tanpa konflik mencerminkan tiadanya secara cukup diferensiasi tujuan, ketrampilan, dan sikap di kalangan para anggotanya—sebuah keadaan yang tidak menguntungkan bagi hadirnya sebuah perubahan.

Konflik mencapai tingkat yang lebih berbahaya ketika partisipan terlibat dalam pertikaian tentang nilai-nilai dasar organisasi atau masyarakat; keadaan ini akan makin diperparah apabila tidak terdapat media yang dapat dipakai oleh partisipan untuk berkomunikasi.

Konflik yang tidak terkendali dan berkepanjangan menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang bertikai. Konflik yang tidak terkendali memboroskan sumber. Baik pemenang maupun yang dikalahkan tidak dapat mengelak dari kerugian. Semua membayar karena konflik memang berongkos.

Konflik yang berkepanjangan memperluas dan memperdalam isu konflik. Dengan kata lain, konflik yang berkepanjangan cenderung menggandakan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa lamanya waktu yang dipakai untuk sebuah konflik berhubungan sejajar dengan muncul dan berkembangnya tema-tema baru. Setiap konflik hanya mampu bertahan apabila ia memperoleh 'energi' baru atau yang diperbarui. Energi

semacam itu hanya dapat diperoleh apabila kelompok, terutama para pemimpinnya, dapat menggerakkan anggotanya untuk menemukan tema-tema yang relevan bagi usaha menemukan sumber (*resources*) pendukung. Ingat, setiap konflik selalu berongkos. Pemenang konflik pada umumnya datang dari kelompok yang lebih unggul memobilisasi sumber-sumber untuk tujuan kolektifnya.

Sejajar dengan itu, seberapa lama sebuah kelompok mampu bertahan dalam sebuah konflik yang berkepanjangan amat ditentukan oleh seberapa banyak kelompok itu dapat mengerahkan sumber-sumber mereka: jumlah anggota kelompok atau mereka yang bersimpati dengan kelompok itu dan sumber ekonomi yang dapat digerakkan mereka. Apabila sebuah kelompok memiliki sumber yang lebih besar, konflik akan berakhir apabila kelompok yang lain telah habis sumber-sumbernya. Apabila kedua belah pihak memiliki sumber-sumber yang belum digali, eskalasi konflik akan terjadi secara berkepanjangan.

Deeskalasi konflik terjadi dalam dua cara. *Pertama*, apabila salah satu kelompok memiliki keunggulan atas pihak yang lain, konflik biasanya segera usai segera setelah kelompok yang lebih lemah dihancurkan kekuataannya untuk melakukan perlawanan. *Kedua*, apabila kedua belah pihak tak mampu mengalahkan lawannya, konflik cenderung mengalami deeskalasi setelah sumber-sumber kedua belah pihak habis dan setelah prospek memenangkan konflik meredup. Walaupun konflik pada awalnya dapat menghasilkan solidaritas internal, terserapnya sumber ke dalam konflik (termasuk hilangnya harta benda dan nyawa) sering menghilangkan antusiasme orang terlibat dalam konflik.

Konflik yang terjadi pada skala dan intensitas yang amat destruktif cenderung lebih cepat usai dibandingkan dengan konflik yang berskala dan berintensitas moderat. Konflik diperburuk ketika masyarakat kehilangan lembaga-lembaga yang dimilikinya sendiri sebagai akibat dari dominasi negara

secara kronik atas warganya. Ketiadaan atau relatif tak berfungsinya infrastruktur yang terdapat dalam masyarakat (seperti partai politik, organisasi massa dan berbagai kelompok kepentingan lainnya) menyebabkan masyarakat kehilangan media dan forum untuk mengembangkan dialog yang dapat memfasilitasi konflik dan mencegahnya berkembang menjadi sesuatu yang destruktif.

Walaupun hampir dalam setiap konflik korban terbesar yang paling menderita adalah kaum perempuan dan anak-anak (di Indonesia proporsi mereka masing-masing sekitar 35% dan 30%), suara mereka praktis terabaikan. Sangat ironis, sementara penyebab konflik pada umumnya adalah kaum pria dan atau dunianya, kaum perempuan dan anak-anak yang harus menanggung beban terburuknya. Dalam banyak sistem sosial, kaum perempuan biasanya memiliki lembaga alternatif (termasuk di antaranya adalah tradisi dan kepercayaan) yang dapat digunakan untuk menemukan penyelesaian konflik. Sayang sekali tawaran terobosan itu jarang dilirik.

Pada bagian lain, lemahnya negara yang diikuti oleh mudarnya fungsi-fungsi kelebagaannya juga menjadi keadaan yang memperburuk konflik. Wibawa negara yang hilang karena banyak sebab, menimbulkan ketidakpercayaan yang meluas pada rakyat akan kemampuan negara untuk menjadi mediator dan bahkan arbitrator konflik. Akibatnya sangat buruk, yakni masyarakat menempuh penyelesaian konflik menurut cara-cara yang mereka percaya paling menguntungkan mereka, atau sekurang-kurangnya meminimalkan kerugian mereka, termasuk di antaranya adalah penggunaan kekerasan.

Secara umum hubungan di antara konflik dan terjadinya kekerasan dapat digambarkan seperti berikut ini. Kekerasan dengan mudah menjadi sebuah lingkaran yang tak mudah diputus apabila di antara pihak-pihak yang bersengketa telah kehilangan kepercayaan, penghormatan dan kesediaan bekerja sama satu terhadap lainnya. Pada gilirannya, hubungan antar-

manusia yang negatif ini mendorong proses penggerusan pada kepercayaan bahwa mereka sesungguhnya merupakan bagian dari sebuah komunitas yang lebih besar, betapapun berbedanya mereka.

Saat semacam ini terjadi, sangat mudah bagi mereka untuk mengembangkan kepercayaan akan adanya ketidakadilan, baik yang nyata maupun yang dipersepsi sebagai nyata. Keadaan inilah yang menyebabkan mengapa pada situasi semacam itu orang dengan mudah kehilangan kemampuan jernihnya untuk mengontrol pikiran dan penilaian mereka. Karena itu, orang juga mulai merasa terancam karena mulai kehilangan rasa amannya baik yang bersifat psikologis maupun emosional. Dorongan untuk menerima kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik menjadi sesuatu yang lebih berpengaruh, utamanya ketika mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan jahatnya yang diakibatkan oleh tiadanya kemampuan untuk membedakan lagi mana yang baik dan buruk, patut dan tak patut.

Ketika penerimaan akan kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik itu terjadi, orang kehilangan penghargaan akan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula ketika akses untuk menggunakan kekerasan itu terbuka, maka kekerasan menjadi sebuah praktik yang dilembagakan yang pada gilirannya menghancurkan pula kepercayaan orang untuk menghargai kebutuhan orang lain untuk mendapatkan hak yang sama akan keselamatan dan kesejahteraan emosional, intelektual, mental, fisik dan spiritualnya. Demikian seterusnya hingga ia menjadi sebuah lingkaran setan yang tak mudah diputuskan.

Pada pokoknya terdapat empat hal yang perlu diperhatikan apabila kita hendak mengendalikan konflik: 1) sumber konflik (*resources, values, ego*); 2) kondisi-kondisi yang memperburuk konflik (misalnya, tiadanya rasa saling percaya, pertentangan budaya, gaya berkomunikasi yang berbeda); 3) perilaku konflik (misalnya, hadir-tidaknya kemarahan dan kegusaran, saling menyalahkan, serangan terhadap individu secara pribadi,

kekerasan); dan 4) tersedianya ketrampilan berkomunikasi pada mediator atau fasilitator (misalnya 3R—*reflect, restate, reframe*). Di samping itu, perlu diperhatikan apa saja yang dapat memperburuk dan menurunkan intensitas konflik. Terdapat sejumlah pertanyaan yang biasanya dipakai untuk menstrukturkan konflik ketika negosiasi sedang berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah: 1) apa yang Anda inginkan?; 2) Apa yang akan menyebabkan Anda (dan orang lain) akan kehilangan muka?; 3) tunjukkan keuntungan bersama apabila mereka mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik; 4) pusatkan pada masa depan, bukan masa lalu; dan 5) antisipasikanlah semua halangan dan kesulitan untuk mencapai kesepakatan itu berikut implikasi lain yang mungkin muncul karenanya.

Apabila menjadi pihak yang memfasilitasi proses mediasi maka berikut ini adalah sejumlah pertanyaan yang dapat membantu melaksanakan tugas itu: 1) apa permasalahannya?; 2) apa saja kemungkinan solusinya?; 3) perilaku-perilaku dan kebijakan-kebijakan (bila ada) apa sajakah yang perlu diubah?; 4) apa saja hasil yang diharapkan?; 5) keuntungan apa saja yang akan diperoleh?; 6) berapa lama proses ini akan memakan waktu?; dan 7) siapa yang akan membuat keputusan tentang ihwal kesepakatan tersebut?

Strategi meminimalisasikan konflik (terutama berlaku untuk konflik pada tingkat organisasi) sebagai berikut.

- a. Penekanan pada tujuan-tujuan bersama. Tekankan pada anggota bahwa ia memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengejar tujuan organisasi secara kolektif. Penekanan ini membantu mereka untuk menyadari peran efektif yang dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam hubungan-hubungan kooperatif dan kolaboratif.
- b. Susun pembagian tugas yang jelas dan terstruktur. Pembagian aktivitas yang didefinisikan secara jelas membantu mereka untuk memahami tugas-tugas pokok serta batas-batas otoritas mereka.

- c. Komunikasi antar-kelompok. Tersedianya media, forum komunikasi di antara anggota dan atau bagian yang berbeda menghindarkan berkembangnya miskonsepsi tentang kemampuan, ketrampilan, dan sifat/karakter anggota/bagian lain.
- d. Hindari situasi yang dapat mendorong para anggota terlibat dalam konflik atau kompetisi yang berpola menangkalah. Kehilangan muka sering menjadi sebab munculnya konflik yang tajam.

Strategi mengurangi konflik. Teknik-teknik yang dikembangkan untuk menurunkan intensitas konflik bergantung pada tingkat konflik tersebut hendak dikendalikan. Prinsip-prinsip berikut ini lazim dikerjakan di lingkungan organisasi/birokrasi.

- a. Teknik-teknik yang berhubungan dengan upaya mengubah perilaku hanya berdampak pada upaya mencegah konflik secara terbuka dan sama sekali tidak akan mengubah sikap-sikap bermusuhan. Upaya semacam ini dapat dilakukan dengan berbagai cara: pemisahan fisik, otoritas-/birokrasi, dan interaksi terbatas.
 - (1) Pemisahan fisik sering merupakan cara penyelesaian yang paling cepat dan mudah. Melalui ini, partisipan dicegah untuk melakukan interaksi fisik. Cara ini efektif untuk keadaan di mana mereka tidak terlibat dalam tugas-tugas bersama. Kerugiannya, ini tidak mengubah sikap-sikap bermusuhan dan boleh jadi hanya menyelesaikan persoalan secara dangkal.
 - (2) Cara birokrasi/otoritas ditempuh ketika top manajemen memaksakan peraturan dan kewenangan yang dimiliki untuk menyelesaikan pertikaian di antara anggotanya. Cara ini merupakan pilihan kedua ketika partisipan tidak mungkin dipisahkan secara fisik.
 - (3) Interaksi di antara partisipan dibatasi hanya pada isu-isu dan tujuan-tujuan bersama—dua hal yang dapat

memaksa mereka untuk bekerja sama, sekurang-kurangnya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Cara ini paling efektif apabila batas-batas tugas dan wewenang di antara mereka dirumuskan secara jelas.

- b. Perubahan pada sikap merupakan tugas yang lebih sulit dilakukan dan memerlukan waktu yang lebih lama karena melibatkan usaha mengurangi persepsi dan perasaan negatif di antara partisipan.
 - (1) Rotasi anggota. Anggota sebuah kelompok dapat diminta untuk bekerja pada kelompok lainnya secara temporer. Cara ini dapat menyingkirkan hambatan-hambatan psikologis yang terdapat di kalangan mereka;
 - (2) Pelatihan bersama. Melalui cara ini dapat dilakukan reorientasi anggota terhadap anggota departemen lainnya.

Multikulturalisme dan Nasionalisme Indonesia

Sebagai sebuah terminologi, multikulturalisme kadang agak membingungkan karena ia merujuk sekaligus pada dua hal yang berbeda: realitas dan etika, atau praktik dan ajaran. Sebagai realitas atau praktik, multikulturalisme dipahami sebagai representasi yang produktif atas interaksi di antara elemen-elemen sosial yang beragam dalam sebuah tataran kehidupan kolektif yang berkelanjutan. Sebagai sebuah etika atau ajaran, multikulturalisme merujuk pada spirit, etos, dan kepercayaan tentang bagaimana keragaman atas unit-unit sosial yang berciri privat dan relatif otonom itu, seperti etnisitas dan budaya, semestinya dikelola dalam ruang-ruang publik.

Dalam masyarakat-masyarakat yang memiliki kesempatan untuk berevolusi melalui perubahan sosial yang panjang dan bersifat gradual, multikulturalisme (dengan nama yang sama atau yang lain) sering merupakan hasil dari sebuah proses sosial dan kesejarahan yang terjadi. Dengan kata lain, sejarah yang panjang telah menghasilkan sebuah tatanan kolektif yang

memungkinkan terpeliharanya di satu pihak keragaman mendapatkan ruang untuk berkembang, dan di pihak lain memungkinkan integrasi sosial di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam masyarakat semacam ini, multikulturalisme adalah hasil dari sebuah logika yang dibangun dari realitas sebuah masyarakat majemuk. Kebanyakan masyarakat Barat jatuh dalam kategori ini. Amerika adalah contoh sebuah masyarakat yang “menemukan” logika “*melting-pot*” sebagai jawaban atas kemajemukan. Logika ini tidak dibangun pertama-tama dari gagasan ideal, tetapi dibangun dari sebuah keniscayaan sosial. Alhasil, *melting-pot*—multikulturalisme ala Amerika—adalah sebuah nilai yang melembaga bersama-sama dengan nilai-nilai penting masyarakat Amerika lainnya. Dalam ekspresi mereka, multikulturalisme adalah jawaban kepada kebutuhan bagi terjaminnya prinsip *the freedom of expression*. Di Australia, dengan sejarah yang agak berbeda, multikulturalisme memperoleh tempat yang penting sebagai institusi sosial yang memperkuat demokrasi dan komitmen warga negara terhadap Australia.

Di kebanyakan bangsa-bangsa bekas jajahan yang terdiri atas kelompok-kelompok etnik dan budaya yang sangat majemuk itu, multikulturalisme adalah sebuah gagasan yang diperjuangkan. Bahkan, lebih dini dari itu, kebanyakan negeri-negeri yang relatif muda usia ini, harus berjuang terlebih dahulu dengan gagasan nasionalisme. Gagasan nasionalisme negeri-negeri yang pada umumnya memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua ini, dibangun melalui kesadaran para pemimpinnya akan sebuah kepercayaan bahwa sebuah negeri yang amat majemuk, sering kali terdiri atas puluhan bahkan ratusan kelompok etnis, hanya mungkin dipersatukan dengan ikrar yang meneguhkan persatuan sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik.

Akar nasionalisme Indonesia sejak awal justru didasarkan pada tekad yang menekankan cita-cita bersama di samping

pengakuan sekaligus penghargaan pada perbedaan sebagai pengikat kebangsaan. Di Indonesia, kesadaran semacam itu—sekurang-kurangnya secara politik—sangat jelas terlihat. *Bhinneka Tunggal Ika* (“berbeda-beda namun satu jua”) adalah prinsip yang mencoba menekankan cita-cita yang sama dan kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Dalam prinsipnya, etika ini meneguhkan pentingnya komitmen kolektif di tingkat negara dan masyarakat untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak, dan pada pihak lain tercapainya cita-cita akan kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia.

Pada tempat inilah, penafsiran pada nasionalisme Indonesia semestinya memperhatikan dua elemen dasar itu secara sekaligus. Ikatan kebangsaan yang semata-mata didasarkan pada nilai-nilai kemakmuran (yang bersifat material itu) dan keadilan (yang bersifat spiritual itu) tidak akan mampu menjawab persoalan tentang bagaimana kemajemukan itu hendak dikelola ke dalam proses pencapaian tujuan bersama yang mulia itu. Pencapaian tujuan bersama jelas merupakan sebuah proses yang tidak saja kompleks secara ekonomi dan politik tetapi juga sebuah proses yang panjang dan berkelanjutan secara sosial dan budaya.

Bangsa semajemuk Indonesia jelas memerlukan lebih dari itu. Nasionalisme Indonesia yang hanya mendasarkan pada elemen pertama, yakni pengikatan diri pada cita-cita bersama akan kemakmuran dan keadilan, senantiasa akan terancam karena mudah dirongrong oleh persepsi tentang kegagalan kolektif kita dalam pencapaian tujuan bersama itu. Di samping itu, nasionalisme yang hanya dibangun pada janji sebuah kehidupan bersama yang lebih baik itu, mudah lapuk karena kemajemukan itu sendiri menawarkan ketegangan yang inheren.

Dalam gagasan pokok semacam inilah, penafsiran atas akar nasionalisme Indonesia itu selayaknya juga memberi dasar bagi sebuah kesadaran kolektif untuk mengembangkan dan

membangun sebuah pendekatan yang memungkinkan keragaman etnik dan kultural itu justru menjadi kekuatan bangsa ini untuk melanjutkan pencapaian cita-citanya.

Multikulturalisme sebagai Alternatif

Dalam pandangan saya, multikulturalisme—didefinisikan oleh banyak kalangan sebagai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain—adalah sebuah tema yang relatif baru dibicarakan di negeri ini. Sebagai sebuah tema, multikulturalisme dibicarakan umumnya dalam kerangka mengunjungi kembali (*revisiting*) dan menemukan kembali (*reinventing*) gagasan-gagasan yang lebih masuk akal tentang bagaimana sebuah masyarakat majemuk di Indonesia ini dapat dikembangkan dalam sebuah konsepsi masyarakat “warna-warni” yang tidak saja berciri partisipatoris namun juga emansipatoris.

Jelas, semangat dasar awalnya adalah mencoba menggugat pertanyaan pokok tentang bagaimana kelompok-kelompok etnik (yang lokal itu) dan budaya (yang partikular itu) itu semestinya memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat nasional yang dikelilingi oleh nilai-nilai universal (seperti demokrasi, keadilan, persamaan, dan kemerdekaan) dan, bahkan akhir-akhir ini, dalam sebuah tataran global yang menyelubungi sebuah perubahan besar. Dengan kata lain, bagaimanakah kelompok-kelompok etnik dan budaya yang berbeda denominasinya itu di satu pihak memiliki kesanggupan untuk memelihara identitas kelompoknya dan di pihak lain mampu berinteraksi dalam ruang bersama yang ditandai oleh kesediaan untuk menerima pluralisme dan toleransi (mengakui dan menghormati perbedaan).

Lebih jelas lagi, bagaimanakah, misalnya, kelompok-kelompok etnik Pidie, Mandailing, Minang, Betawi, Sunda,

Jawa, Cina, Bali, Manggarai, Ambon, Manado, Serui, yang beragama Islam, Hindu, Khong Hu Cu, Budha, Kristen, Katolik, atau yang beraliran kepercayaan Pangestu, itu semua, mampu hidup berdampingan dalam sebuah habitat sosial yang di satu pihak memberi tempat bagi terpeliharanya identitas lokal dan kepercayaan partikularnya masing-masing, dan di pihak lain memberi kesempatan bagi sebuah proses terjadinya integrasi sosial, politik, budaya, dan ekonomi di tingkat nasional dan global.

Memang, ihwal itu bukan hal sederhana. Ketidaksederhanaan perkaranya *pertama*, terletak pada masalah bagaimana kesadaran bersama itu dibangun dalam sebuah ruang yang di samping memberikan kebebasan untuk melakukan interpretasi yang serba-ragam juga mengundang elemen-elemen yang berbeda itu untuk menemukan kebutuhan bersama bagi sebuah integrasi di tingkat yang lebih tinggi. *Kedua*, proses itu tidak terjadi dalam ruang yang terisolasi dari persoalan-persoalan ketidakmerataan, bahkan ketidakadilan, tentang bagaimana sumber-sumber politik dan ekonomi itu dialokasikan dan didistribusikan dalam masyarakat nasional dan internasional. *Ketiga*, perubahan yang berlangsung di tataran global mendiktekan agenda-agenda politik dan ekonomi baru yang mempersempit kesempatan untuk mendefinisikan kembali gagasan-gagasan dasar tentang negara (serba-) bangsa (*the idea of Indonesian (multi-) nation-state*) tanpa mengindahkan gagasan-gagasan dan praktek-praktek materialisme-rasional yang dibawa serta oleh ekonomi pasar global.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa usaha mempromosikan multikulturalisme di Indonesia adalah sebuah langkah yang muskil. Akan tetapi multikulturalisme merupakan sebuah agenda besar bersama kita yang tidak saja perlu dan penting, tetapi juga merupakan satu-satunya jawaban atas kegagalan di masa lalu mengelola masyarakat majemuk di Indonesia. Walaupun begitu, bangsa Indonesia sedang menghadapi cara mendefinisikan, menyepakati, mempromosikan, dan melemba-

gakan multikulturalisme sebagai sebuah proses yang sepenuhnya harus dipahami sebagai agenda yang asli dan baru dalam wacana politik-budaya di Indonesia. Dalam pengertian ini, multikulturalisme jelas harus bersaing dengan pendekatan asimilasi (di negeri ini juga dikenal dengan nama populer pembauran) dan bahkan mungkin juga dengan pendekatan Integrasi yang pada masa lalu dipromosikan oleh eksponen BAPPERKI.

Dalam pandangan kritis saya, pendekatan asimiliasi berangkat dari kesadaran tipologis tentang (yang) “asli” dan (yang) “asing”. Asumsi yang dipakai dalam tipologi ini adalah yang “asli” harus dilindungi dari yang “asing” karena kepercayaan bahwa yang disebut terakhir itu memiliki potensi mengancam yang pertama. Itu sebabnya pendekatan asimilasi mendiktekan sebuah strategi budaya yang mendorong yang “asing” membaaur dengan yang “asli”. Harus dikatakan di sini, walaupun secara teoritis yang disebut dengan yang “asing” itu berlaku untuk semua yang “tidak asli”, dalam kenyataannya wacana itu terutama diarahkan pada kelompok etnis Cina. Tidak heran apabila pendekatan asimilasi ini dituduh tidak hanya berbau *xenophobia* tetapi juga rasis. Di samping itu, sebenarnya terdapat masalah yang rumit dalam mengoperasikan definisi tentang “asli” dan “asing” di negeri kepulauan ini yang selama berabad-abad sebelumnya menerima migrasi dari berbagai bangsa.

Sementara itu, pendekatan integrasi, menurut saya, tidak cukup lengkap menjawab kebutuhan masyarakat majemuk di negeri ini. Salah satu alasan utamanya adalah, pendekatan ini jelas dimaksudkan pada awalnya sebagai reaksi penolakan sebagian kelompok etnis Cina terhadap gagasan pembauran. Saya tidak menampik pada gagasan dasarnya yang menuntut penerimaan dan perlakuan yang sama terhadap kelompok etnis Cina di Indonesia—sesama seperti yang diterima oleh kelompok-kelompok etnis lainnya (baik yang “asli” maupun

yang “asing” lainnya seperti kelompok etnis Arab atau yang setengah “asli”—setengah “asing” seperti kaum Indo).

Tidak ada penolakan saya sedikitpun tentang gagasan itu. Apa yang saya kira tidak memadai dari pendekatan integrasi itu adalah tidak hadirnya konsepsi masyarakat yang dibangun atas ciri kemajemukan yang partisipatoris dan emansipatoris. Selain itu, pendekatan integrasi berkesan memfokuskan perhatiannya pada hubungan di antara etnis Cina dan bumiputera daripada terutama pada hubungan antar-etnis yang beragam di negeri ini termasuk etnis Cina.

Dalam keyakinan saya, sebagai sebuah pendekatan politik budaya, multikulturalisme menawarkan hadirnya realitas ganda atau (*dual-reality*) atau bahkan realitas ragam (*multy-reality*) sekaligus: perbedaan-kemiripan (*differences-similarities*), keragaman-kesatuan (*diversity-unity*), identitas-integrasi (*identity-integration*), lokalitas/partikularitas-universalitas (*locality/particularity-universality*), nasionalitas-globalitas (*nationality-globality*). Dalam konstruksi seperti itu, multikulturalisme memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan mengeliminasi ketegangan dikotomis tentang realitas ganda atau ragam di sekitar etnisitas dan budaya.

Jelas, multikulturalisme tidak pernah dimaksudkan untuk menghilangkan kekhususan (*specificity*) dari sebuah ciri etnik atau budaya; tidak juga dimaksudkan untuk meleburnya ke dalam sebuah keumuman (*generality*). Dengan definisi seperti ini, multikulturalisme dalam pandangan saya adalah, sebuah formasi sosial yang membukakan jalan bagi dibangunnya ruang-ruang bagi identitas yang beragam dan sekaligus jembatan yang menghubungkan ruang-ruang itu untuk sebuah integrasi.

Pendekatan Pro-Eksistensi sebagai Pilar Multikulturalisme

Mempromosikan multikulturalisme, bukan sekedar langkah menyuguhkan warna-warni identitas. Tetapi, pertama-tama, membangun kesadaran tentang pentingnya kelompok-kelom-

pok etnis dan budaya itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dalam ruang bersama. Kata kunci dari pendekatan ini terletak pada usaha yang lebih sistematis untuk menyertakan pendekatan struktural politik dan ekonomi dalam proses itu. Ini berarti bahwa multikulturalisme di negeri ini membutuhkan pengintegrasian pendekatan lainnya selain budaya untuk memungkinkan tema-tema yang relevan di sekitar keadilan ekonomi dan persamaan hak dapat menjadi faktor yang ikut memperkuat multikulturalisme.

Ini juga berarti bahwa pendekatan yang menekankan prinsip koeksistensi (*co-existence*) sebagai dasar multikulturalisme tidaklah dapat dianggap cukup. Sebagai gantinya dibutuhkan pendekatan yang lebih jauh dari itu, yakni sebuah pendekatan yang menggeser prinsip koeksistensi ke arah proeksistensi (*pro-existence*). Prinsip proeksistensi ini ditandai tidak saja oleh hadirnya kualitas hidup berdampingan secara damai, tetapi juga oleh kesadaran untuk ikut menjadi bagian dari usaha memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok lain.

Karena itu, proeksistensi menghendaki diakhirinya kebisuan (*silence*) dan pembiaran (*ignorance*) atas nasib kelompok lain. Dengan kata lain, pro-eksistensi mensyaratkan juga prinsip inklusi, bukan eksklusivitas (*inclusion, not exclusion*). Kualitas semacam ini diperlukan untuk memungkinkan kelompok-kelompok yang berbeda itu memiliki kebutuhan untuk menghasilkan integrasi di samping identitas lokal dan partikular yang serba-ragam itu.

Di tingkat global, multikulturalisme menghadapi ancaman yang berbeda. Apabila di tingkat negara bangsa, multikulturalisme diperlukan untuk mengelola identitas etnik dan kultural yang serba-ragam itu, di tingkat global kecenderungan yang sebaliknya justru sedang terjadi. Globalisasi menghasilkan kecenderungan monokulturalisme yang terutama didorong oleh proses-proses dan praktik-praktik material-rasional yang dibawa oleh ekonomi pasar global. Walaupun di atas per-

mukaan teknologi informasi tampak secara ramai mendorong terjadinya pertukaran budaya (*cultural exchanges*), di antaranya melalui prinsip meminjaman (*borrowing*) dan sampai batas-batas tertentu sinkretisme, yang sesungguhnya terjadi tidak lebih dari usaha penegasan budaya dominan di atas yang lain.

Konsep “*other*” dipakai untuk membangun sebuah struktur hirarki budaya dominan-marjinal, modern-etnik, global-lokal. Jelas, ini bukan multikulturalisme yang partisipatoris dan emansipatoris. Struktur hirarki budaya semacam ini hanya ingin mengukuhkan superioritas yang disebut pertama (dominan-moderen-global) atas yang terakhir (marjinal-etnik-lokal). Apa yang disebut terakhir dihadirkan sebagai bentuk ekspresi eksotisme komunitas etnik yang lokal, mungkin sekaligus partikular, sebagai kontras dari rasionalitas modernitas global.

Walaupun pembicaraan tentang tema ini merupakan arena yang berbeda dari yang dibicarakan sebelumnya, dalam pandangan penulis, sangat penting untuk memperhatikan apa yang penulis sebut sebagai perangkap budaya globalisasi. Multikulturalisme global yang sedang terjadi dapat membuat kita terasing pada dua hal sekaligus: terasing dari habitat sendiri dan dari dunia yang mengelilinginya. Perangkap ini dapat membuat terkecoh, karena multikulturalisme yang pada dasarnya tak berbeda dengan pendekatan asimilasi, justru mengakibatkan terjadinya proses dislokasi, disorientasi, disafiliasi, dan disintegrasi.

Di tengah globalisasi, isolasi memang bukan jawaban atas perkara itu. Dunia sedang berubah dan selalu begitu. Perubahan yang saat ini sedang terjadi menjadi lain dari perubahan-perubahan sebelumnya karena konsepsi tentang identitas tidak lagi dapat dikurung dalam ruang hampa. Globalisasi membuat kesadaran etnik dan budaya menjadi serba absurd. Relativitas menjadikan identitas tidak mudah dikonstruksikan oleh proses-proses budaya yang otonom. Karena itu, multikulturalisme, baik di tingkat nasional maupun global, membutuhkan redefinisi atas kehidupan

bersama. Juga, reposisi dan renegotiasi atas cara yang telah dilakukan, memberi makna atas prinsip-prinsip keadilan dan persamaan yang terkandung dalam ajaran-ajaran universal tentang demokrasi dan HAM.

Dalam keyakinan penulis, yang dibutuhkan bukan monokulturalisme tetapi multikulturalisme; bukan pembauran tetapi pambaruan; bukan eksklusivitas tetapi inklusi; bukan separasi tetapi interaksi, bukan koeksistensi tetapi proeksistensi. Bukan juga kemajemukan demi kemajemukan, atau kemajemukan sekedar warna-warni, tetapi kemajemukan yang dibangun di atas landasan multikulturalisme yang emansipatorik.

Penutup

Sebagai penutup, penulis ingin menekankan tentang pentingnya sebuah kebutuhan akan hadirnya kesadaran yang lebih kritis terhadap kemajemukan dan hubungannya dengan politik identitas serta potensi konflik dan disintegrasi yang dihasilkannya. Adalah jelas bahwa kecenderungan akan berkembangnya politik identitas tidaklah dapat dihindari, baik karena alasan-alasan yang melekat dalam prinsip demokrasi maupun yang disediakan sendiri oleh fenomena kemajemukan. Berkembangnya praktek politik yang berbasis identitas dengan sendirinya tidak dapat dicegah apabila tidak tersedia ruang bagi perbedaan (*difference*). Sebaliknya, membiarkan perbedaan berkembang menjadi praktik politik baru yang mengancam prinsip-prinsip penting yang dijunjung tinggi dalam demokrasi dan HAM adalah sebuah langkah yang mendorong terjadinya penghancuran sendiri terhadap sebuah kolektif sosial yang beradab.

Dalam kepercayaan penulis, multikulturalisme yang berpendekatan proeksistensi adalah strategi resolusi konflik yang mampu mentransformasikan ketegangan yang dibawa sekaligus oleh demokrasi dan kemajemukan ke dalam sebuah tatanan sosial baru yang memberi ruang bagi hadirnya interaksi yang produktif di antara identitas-identitas yang

beragam namun memiliki integrasi sosial yang mampu menjamin prinsip-prinsip demokrasi dan HAM secara berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Alcoff, L. and Mendieta, E., 2003, *Identities: Race, Class, Gender, and Nationality*, Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Bradley, H., 1997, *Fractured Identity: Changing Patterns of Inequality*, Cambridge: Polity.
- Calhoun, C., (Ed.), 1994, *Social Theory and the Politics of Identity*, Oxford: Blackwell.
- Castells, M., 2004, *The Power of Identity*, Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Hall, S. and du Gay, P. (Eds), 1996, *Questions of Social Identity*, London: Sage Publications.
- Jenkins, R., 1996, *Social Identity*, London: Routledge.
- Kenny, M., 2004, *The Politics of Identity*, Cambridge: Polity.
- Storry, M and Childs, P. (Eds.), 1997, *British Cultural Identities*, London: Routledge.